



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KOMISI IX DPR RI
(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kependudukan)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 11 (sebelas)
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan secara tatap muka dan virtual
Dengan	: 1. Menteri Kesehatan RI; 2. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional; 3. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Kamis, 9 Februari 2023
Pukul	: 14.00 WIB – selesai
Acara	: 1. Penjelasan perkembangan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), yang mencakup evaluasi kesiapan rumah sakit dan dampak terhadap Dana Jaminan Sosial (DJS) kesehatan. 2. Penjelasan tentang Hasil pembahasan review tarif Layanan Jaminan Kesehatan Nasional.
Ketua Rapat	: Felly Estelita Runtuwene, SE./ Ketua Komisi IX DPR RI dilanjutkan oleh Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Ida Nuryati, S.Sos., M.A / Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Peserta Rapat Hadir dan Virtual	: A. Fisik 26 orang Virtual 19 orang dari 50 orang Anggota Komisi IX DPR RI; B. Menteri Kesehatan, diwakili oleh Wakil Menteri Kesehatan RI : Dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD., PhD., KEMD. C. Dilanjutka oleh Menteri Kesehatan RI : Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU D. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, diwakili oleh Ketua Komisi Kebijakan Umum DJSN : Mickael Bobby Hoelman, S.E., M.Si. beserta jajarannya.

E. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan : Prof. dr. Ali Gufron Mukti MSc., PhD., AAK beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI, yang diwakili oleh Wakil Menteri Kesehatan RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, yang diwakili oleh Ketua Komisi Kebijakan Umum Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dibuka pukul 16.11 WIB., dilaksanakan secara tatap muka dan virtual, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mengemukakan keras ketidakhadiran Ketua DJSN yang berulang kali dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI sehingga menghambat perbaikan kebijakan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional. Ketidakhadiran tersebut melanggar Pasal 73 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Komisi IX DPR RI akan melakukan panggilan paksa Ketua DJSN dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jika pada rapat Komisi IX DPR RI yang akan datang Ketua DJSN tidak hadir.
3. Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan DJSN dan Dirut BPJS Kesehatan pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 tidak dilanjutkan karena ketidakhadiran Ketua DJSN.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 20.11 WIB.

Jakarta, 9 Februari 2023

KETUA RAPAT/
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,



DR. HJ. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.SI

A-425